

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ruang lingkup partisipasi antara Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik hasil penelitian ini menunjukan bahwa :
 - a. Partisipasi warga miskin dalam proses pembuatan keputusan di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik terdiri dari penggalian gagasan penyusunan dokumen RPJM Nagari, pencermatan ulang dokumen RPJM Nagari dalam rangka penentuan skala prioritas kegiatan di jorong dan rapat sosialisasi kegiatan dengan hasil sebagai berikut :
 - a) Penggalian gagasan dokumen RPJM Nagari Tanjuang Alam tahun 2017-2023 dan penyusunan dokumen RKP Nagari di 3 Nagari umumnya dihadiri seluruhnya oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diantara tokoh-tokoh masyarakat tersebut terdapat beberapa yang tercatat sebagai penerima bantuan dan terdaftar dalam data BDT Dinas Soaial Kabupaten Tanah Datar.
 - b) Penggalian gagasan dalam penyusunan dokumen RPJM Nagari Tanjuang Alam tahun 2017-2023 dan penyusunan dokumen RKP Nagari di 3 Nagari umumnya dihadiri seluruhnya oleh tokoh-tokoh masyarakat dan diantara tokoh-tokoh masyarakat tersebut terdapat beberapa yang tercatat sebagai penerima bantuan dan terdaftar dalam data BDT Dinas Soaial Kabupaten Tanah Datar.
 - c) Penggalian gagasan dalam penyusunan dokumen RPJM Nagari Sumanik tahun 2017-2023 dan penyusunan dokumen RKP Nagari di 2 Nagari umumnya dihadiri oleh tokoh masyarakat dan terdapat rata-rata sekitar 40 % warga miskin yang hadir dari seluruh jumlah peserta rapat.
 - d) Rapat sosialisasi kegiatan dan penyusunan TPK Jorong di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik umumnya sama yaitu warga miskin sangat antusias mengikuti rapat disebabkan karena dalam rapat tersebut disebutkan bantuan-bantuan yang akan masuk ke jorong termasuk bantuan- bantuan untuk warga miskin seperti rehab rumah miskin,

pembangunan dan perbaikan drainase, pembukaan jalan usaha tani dan lain sebagainya.

- e) Faktor pemilihan waktu rapat sangat berpengaruh terhadap kehadiran warga yang benar-benar miskin. Rapat yang dilaksanakan sesuadah sholat jum'at cenderung dihadiri oleh tokoh masyarakat saja sedangkan rapat yang dilaksanakan pada malam hari membuka peluang untuk warga miskin hadir.
 - b. Partisipasi warga miskin dalam keikutsertaan evaluasi dapat dilihat dalam bentuk pemberian kritik dan saran. Pemberian kritik dan saran oleh warga miskin baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik dilakukan secara lisan kepada kepala jorong dengan frekuensi yang sangat minim sekali. Hal tersebut disebabkan karena tidak terdapatnya kotak saran di masing-masing jorong.
2. Berdasarkan kedalaman partisipasi antara Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik hasil penelitian ini menunjukan bahwa :
- a. Untuk rapat penggalian gagasan RPJM dan rapat penyusunan dokumen RKP Nagari kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari tingkat keterlibatannya antara Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik relatif sama yaitu berupa partisipasi yang dibangkitkan karena diundang secara resmi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Nagari. Sementara kedalaman partisipasi dalam memberikan kritik dan saran baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik dikategorikan sebagai partisipasi spontan karena warga miskin memberikan kritik dan saran secara spontan tanpa permintaan dari Pemerintah Nagari.
 - b. Kedalaman partisipasi dilihat dari cara keterlibatan terdapat perbedaan yang mencolok antara Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik. Partisipasi dalam pembuatan keputusan di Nagari Tanjuang Alam tergolong pada partisipasi tidak langsung sementara di Nagari Sumanik dapat digolongkan sebagai partisipasi langsung.
 - c. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari keterlibatan berbagai tahap proses perencanaan pembangunan baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik digolongkan sebagai partisipasi sebagian

tahap karena tidak semua proses perencanaan dapat diikuti oleh Warga Miskin

- d. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari tingkat organisasi baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik relatif sama yaitu merupakan partisipasi yang terorganisasi karena dilakukan secara terorganisir oleh Pemerintah Nagari.
- e. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari intensitas partisipasi baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik dapat digolongkan sebagai partisipasi ekstensif karena intensitas musyawarah di tingkat jorong dilakukan tidak secara intensif atau dengan frekuensi yang tinggi.
- f. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari kisaran aktivitas yang dapat dijangkau di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik umumnya adalah sama dimana untuk partisipasi dalam pengambilan keputusan kedalaman partisipasi dapat digolongkan sebagai partisipasi tidak terbatas sedangkan keikutsertaan memberikan kritik dan saran dapat digolongkan sebagai partisipasi terbatas. Dikatakan partisipasi tidak terbatas disebabkan seluruh usaha dapat dikontrol oleh anggota komunitas dalam hal ini adalah peserta rapat. Sementara digolongkan tidak terbatas karena kondisi pemberian kritik dan saran oleh warga miskin terbatas dan dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat khususnya warga miskin itu sendiri.
- g. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari tingkat efektifitas terdapat perbedaan antara Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik. Untuk partisipasi dalam pembuatan keputusan di Nagari Tanjuang Alam kedalaman partisipasi digolongkan sebagai partisipasi inefektif sementara di Nagari Sumanik dapat dikategorikan sebagai partisipasi efektif. Partisipasi efektif disebabkan karena tujuan pembangunan partisipatif yang melibatkan masyarakat miskin secara langsung di Nagari Tanjuang Alam tidak dapat tercapai secara optimal, sementara itu di Nagari Sumanik partisipasi efektif karena warga miskin yang hadir dalam rapat-rapat jorong murni karena status sosial sebagai warga miskin dan bukan karena status sosial lainnya sebagai tokoh masyarakat.

- h. Kedalaman partisipasi dilihat dari siapa yang berpartisipasi baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik sebagai partisipasi yang melibatkan anggota komunitas lokal dalam hal ini adalah warga asli dari Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik itu sendiri.
 - i. Kedalaman partisipasi warga miskin dilihat dari tujuan dan gaya partisipasi baik di Nagari Tanjuang Alam maupun di Nagari Sumanik keduanya dikategorikan sebagai partisipasi dalam pembangunan daerah.
3. Faktor penyebab partisipasi orang miskin dalam mengikuti rapat-rapat perencanaan pembangunan di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik terdapat perbedaan dimana jorong-jorong yang melakukan rapat setelah sholat Jum'at (Jorong Sawah Parik dan Jorong Koto Laweh) orang miskin yang hadir bukan mewakili diri mereka atas kemiskinan yang melekat pada diri mereka namun disebabkan karena status sosial lain yang melekat pada diri mereka seperti unsur ninik mamak, unsur cadiak pandai, bundo kanduang dan lain sebagainya. Sementara jorong-jorong yang melakukan penggalian gagasan setelah Sholat Isya (jorong Gunung, jorong Guguk Manih dan Jorong Piliang Sani) faktor penyebab partisipasi orang miskin hadir karena mereka adalah jamaah masjid yang setelah sholat Isya berkesempatan untuk duduk dan hadir mengikuti rapat perumusan perencanaan pembangunan nagari.
4. Proses dan mekanisme pelibatan multistakeholder di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik adalah sebagai berikut :
- a. Proses perencanaan rapat di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik umumnya sama dimana untuk peserta rapat penggalian gagasan RPJM 2017-2023 telah mempedomani Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dimana pelibatan multistakeholder dalam rapat bersifat partisipatif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada.
 - b. Cara pelaksanaan rapat di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik telah berpedoman pada Permendagri 114 tahun 2014 relatif sama dimana rapat penggalian gagasan RPJM 2017-2023 dan rapat penyusunan dokumen APB Nagari rapat dilaksanakan diarahkan oleh Tim RPJM dan Tim APB Nagari yang di SK kan oleh Wali Nagari. Dalam pelaksanaan rapat dipandu oleh

Pendamping Lokal Desa (PLD) dengan mempergunakan alat bantu kerja berupa sketsa nagari, kalendser musim dan bagan kelembagaan nagari. Sementara untuk cara pelaksanaan rapat pelaksanaan kegiatan yang terdapat dalam dokumen APB Nagari setelah disahkan oleh BPRN cara pelaksanaan rapat tidak seformal rapat penggalian gagasan RPJM dan penyusunan APB Nagari. Rapat hanya digagas oleh kepala jorong untuk mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang telah diakomodir dalam dokumen APB Nagari sekaligus membicarakan pelaksanaan gotong royong sebelum kegiatan dimulai.

- c. Suasana Pelaksanaan rapat perumusan perencanaan pembangunan nagari di Nagari Tanjuangl Alam dan Nagari Sumanik relatif sama dimana suasana rapat penggalian gagasan RPJM dan penyusunan dokumen APB Nagari bersifat formal dan terarah karena dimoderatori oleh Tim dari Pemerintah Nagari sedangkan rapat pelaksanaan kegiatan APB Nagari suasana rapat tidak formal dan hanya dimoderatori oleh kepala jorong.
- d. Partisipasi aktif orang miskin dalam rapat perumusan perencanaan pembangunan Nagari di Nagari Tanjuang Alam (jorong Gunung) dan Nagari Sumanik (jorong Guguk Manih dan Jorong Piliang Sani) adalah cenderung diam dan tidak aktif dalam mengikuti rapat perumusan perencanaan pembangunan nagari.
- e. Dalam pelaksanaan rapat perumusan perencanaan pembangunan nagari di Nagari Tanjuang Alam dan Nagari Sumanik kecenderungan didominasi oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti unsur ninik mamak, cadiak pandai, alim ulama yang telah terbiasa berbicara dalam forum-forum formal tingkat jorong dan nagari.

B. Saran

1. Dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nagari khusunya dalam rapat penggalian gagasan RPJM Nagari disarankan agar penggalian gagasan tidak hanya pada bidang pembangunan fisik saja melainkan terdapat juga penggalian gagasan di bidang pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk memberikan ruang partisipasi masyarakat khususnya orang miskin dalam proses evaluasi perencanaan pembangunan nagari disarankan media

informasi berupa kotak saran dapat disediakan di setiap jorong sehingga orang miskin dapat memberikan saran, kritik terhadap proses perencanaan pembangunan di nagari.

3. Untuk lebih melibatkan masyarakat miskin dalam proses perumusan perencanaan pembangunan nagari sesuai dengan Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari disarankan agar disetiap jorong dibentuk kelompok masyarakat miskin yang terstruktur sehingga dalam setiap rapat dapat diundang secara formal melalui surat dan bukan hanya undangan melalui pengeras suara yang ada di masjid.
4. Untuk menghindari monopoli dalam setiap rapat perumusan perencanaan pembangunan nagari disarankan agar pemimpin rapat adalah orang yang berpengalaman dalam memimpin rapat.

